

BAHASA MEDIA: ANALISA SENSITIVITAS GENDER DAN KONTESTASI KEKUASAAN

Oleh: Witriani

**Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisutjipto Yogyakarta 55281
e-mail: witri_indi@yahoo.com**

Abstract

This paper discusses about media analysis especially on language news of the current issues in both electronic and printed media of Indonesia. Focus on the gender issues on the headline news of media, the writer analyzes various types of gender insensitivity among the media as being portrayed in the titles especially for such criminal cases in which women were involved both as the victims and the doer or lawbreakers. It's a library research, in which the writer focuses on certain cases to be analyzed and collects all related data to support the analysis. Since the object of the analysis is the title of various headlines news, the theoretical approaches here are theory of semiotic and representation. The research finds out that as being represented in the titles, some media are not quite sensitive in viewing various cases happened in the society, especially related to gender inequality. The media only focused on how to get a lot of audience attention but ignoring the effects on the readers. The bias news would essentially causes and strengthens myths which only bring such benefit to a certain interest especially the power or those who control the rule. The research also finds that the power relation between men and women in the public area also contribute in generating such bias statements or news, not only on the choice of words but also on angle and gender perspective. The bias news represents the bias society.

Tulisan ini merupakan analisa media khususnya yang terkait dengan penggunaan bahasa di media cetak maupun elektronik. Fokus pada isu gender yang tercermin pada

judul-judul pemberitaan media massa , penulis fokus pada analisa terhadap sejumlah kasus kriminal yang melibatkan perempuan baik sebagai korban maupun pelaku kriminal. Dengan pendekatan kajian semiotika dan representasi, penulis menemukan bahwa sebagaimana tercermin pada judul-judul pemberitaan yang melibatkan perempuan, banyak media tidak cukup sensitif dalam melihat persoalan khususnya yang terkait dengan kesetaraan gender yang ada di masyarakat. Hal ini juga menunjukkan ketimpangan pemahaman pekerja media terhadap posisi dan relasi perempuan dan laki-laki di ranah publik. Sebagian besar media hanya fokus pada bagaimana menarik perhatian pembaca atau pemirsa dengan judul yang terkadang provokatif, namun cenderung mengabaikan efeknya terhadap pembaca. Berita ataupun bahasa yang bias hanya akan menghasilkan dan memperkuat mitos-mitos yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu khususnya yang terkait kekuasaan atau yang memiliki kepentingan di dalamnya. Penelitian juga menemukan bahwa hubungan kuasa antara laki-laki dan perempuan di ranah publik juga melahirkan pernyataan-pernyataan yang bias dalam kasus tertentu, tidak hanya pada pemilihan kata, namun juga pada angle dan perspektif pemberitaan. Berita yang bias sesungguhnya juga mencerminkan masyarakat yang juga bias.

Kata kunci: bias; bahasa; sensitivitas gender; hubungan kuasa.

A. PENDAHULUAN

Beberapa waktu yang lalu cukup menarik mencermati berita di media cetak maupun elektronik tentang kasus korupsi yang melibatkan beberapa orang tokoh seperti Miranda S Gultom, Angelina Sondakh, Wa ode Nurhayati , Nunun Nurbaety, dan lain-lain. Entah kebetulan atau tidak, kasus-kasus yang disorot tersebut melibatkan perempuan ,baik sebagai tokoh sentral yang kebetulan juga seorang *publik figure* seperti Angelina Sondakh dan Miranda S Gultom, maupun tokoh pembantu yang kemunculannya mendadak menjadi sorotan seperti Mindo Rosalina Manulang dan Nunun Nurbaety , setelah sebelumnya

ada Malinda Dee, dan Artalyta Suryani yang cukup menggemparkan.

Sekilas memang tidak ada yang salah dengan pemberitaan-pemberitaan tersebut. Berbagai wawancara yang dijadikan narasumber berita pun umumnya memberitakan fakta yang cukup berimbang. Namun ketika info terbaru tidak didapatkan lagi ataupun kebutuhan akan informasi yang lebih luas dan komprehensif semakin meningkat, maka bermunculanlah berbagai opini dan model pemberitaan yang cenderung sumir, bias gender dan menyudutkan korban ataupun pelaku yang kebetulan perempuan.

Disadari atau tidak, objektifikasi perempuan sesungguhnya bukanlah hal yang baru dan dalam dunia media massa. Mulai dari seksualitas hingga peran dan fungsi mereka secara sosial, ekonomi hingga politik selalu menjadi topik menarik tersendiri tidak hanya bagi pekerja, tetapi juga peminat media ataupun khalayak. Maka tidaklah heran misalnya ketika seorang perempuan, katakanlah seorang *publik figure* perempuan tersangkut suatu masalah, maka pemberitaan tentang tokoh tersebut seakan tidak ada habisnya, yang tidak hanya menyoroti hal-hal menjadi pokok permasalahan, namun juga hal-hal yang sesungguhnya tidak esensial dan tidak patut untuk dibicarakan di area publik.

Mulai dari pemberitaan di koran dan televisi dengan skala lokal maupun nasional hingga opini di media cetak ataupun *online*, bermunculan berbagai artikel dan wacana yang menggunakan bahasa dan judul yang "berbeda" untuk menarik perhatian pemirsa ataupun publik, misalnya, "Tiga Diva Penghuni Rumah Tahanan KPK" (Metro TV, senin, 4 Juni 2012), "KPK didatangi Wanita-Wanita Seksi" (Metro News, 20 februari 2012) , "Perempuan di Balik Skandal Korupsi" (Lampung Post, 31 Maret 2012) ataupun opini "Antara lady Gaga, Miranda Gultom, dan Nunun Nurbaety" oleh Analgin Ginting (Kompasiana);

"Perempuan-Perempuan Koruptor" (Media Islamnet, 19 Desember 2011).

Bahkan, beberapa waktu yang lalu, ketika ada tabrakan maut oleh pelaku tunggal seperti yang terjadi di Tugu Tani oleh Afriani Susanti ataupun yang belakangan terjadi oleh Novi Amalia di Tamasari, Jakarta Barat, maka pemberitaan terhadap kedua kasus ini begitu luar biasa dan sangat menyita perhatian publik. Ekspos berita ini menjadi menarik tidak hanya karena jumlah korban yang cukup signifikan, dan menimbulkan kematian, tetapi juga karena pelakunya yang kebetulan perempuan dan terkait dengan narkoba. Terhadap kasus Novi Amalia, misalnya, *angle* pemberitaan yang sumir, yang mengupas tuntas keberadaan dan aktivitas pelaku menjadi sangat bervariasi, dan bahkan melenceng dari esensi kasus yang sesungguhnya, antara lain: "Wanita Bugil tabrak 7 orang" (Fokus - Indosiar, 11/10/2012), "Novi, Sembilan Tahun Jadi Model Setengah Bugil" (Inilah.Com, Sabtu, 13 Oktober 2012), "Cewek Stres yang Tabrak Polisi di Taman Sari, Cuma Pakai BH & CelanaDalam" (Detiknews, 11/10/2012), "Semi Bugil Novie, Pernah Mengamuk di Pantura" (Jpnn.com, 15/10/2012). Sebagian besar judul berita-berita ini dapat dijumpai di media online, yang bisa diakses kapan saja. Namun untuk media televisi, seperti Indosiar pada acara "Fokus-Indosiar", judul tersebut muncul pada saat berita dibacakan.

Model pemberitaan yang bernada bias dan bahkan cenderung menyudutkan ini sesungguhnya memperlihatkan perspektif yang masih bias gender di antara pekerja media. Karena seperti diungkapkan oleh Roger Fowler (1991 : 15) dalam bukunya *Language in the News*, berita merupakan representasi dunia dalam bahasa, karena bahasa adalah kode semiotik. Dengan demikian, ketika suatu berita diulas dari satu sudut pandang yang bias, pada dasarnya juga menunjukkan timpangnya pemahaman si pembuat berita, yang dalam beberapa kasus di atas berkaitan dengan ketidakadilan gender.

Fokus pada judul pemberitaan di media massa, tulisan ini selanjutnya mengkaji tentang pemberitaan yang bias gender, penyebab, ataupun latar belakangnya berikut kepentingan ekonomi politik pelaku media dibalik pemberitaan tersebut

B. MEDIA GENDER

Media dan gender dewasa ini masih menyisakan persoalan yang cukup serius di tanah air. Di bidang jurnalistik, permasalahan gender tidak terbatas pada produksi teks yang bias gender tetapi juga pada ranah profesi jurnalis di mana jurnalis diposisikan sebagai profesi milik laki-laki (Krini Kafiris, 2004: 35). Dengan perspektif dan pemahaman yang tidak berimbang ini, kasus-kasus pemberitaan yang menyudutkan dan merugikan kaum perempuan pun masih marak terjadi, baik dari segi bahasa, *angle* berita, konteks (*context*), narasumber (*source*), maupun gambar (*visual*). Misalnya, di berbagai media, eksploitasi kaum wanita lebih banyak fokus pada kondisi fisik ataupun seksual perempuan daripada pencapaian mereka di berbagai bidang. Hal ini tentu saja berdampak pada pelabelan ataupun stigma (negatif) terhadap kaum perempuan, bahwa perempuan lebih dianggap sebagai objek komoditas atau bahkan komoditas itu sendiri daripada pelaku atau subjek yang diakui keberadaannya yang berkontribusi pada peradaban umat manusia.

Terkait kajian gender, isu kesetaraan laki-laki dan perempuan tidak hanya marak belakangan ini saja, tetap telah melalui proses yang cukup panjang dan berliku. Pandangan masyarakat atas gender dan aspek yang terkait dengannya tidak semudah pemahaman akan seks atau jenis kelamin yang membedakan laki-laki dan perempuan. Gender terkait erat dengan seksualitas, yakni pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial. Menurut Dr. Mansour Fakih (1996: 9), konsep gender

merupakan semua hal yang bisa dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari kelas ke kelas lainnya.

Ketika konsep gender ini dipahami secara benar oleh masyarakat, maka hal tersebut akan berkorelasi dengan tumbuhnya keadilan dan kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, ketika pemahaman ini timpang, maka pandangan-pandangan yang bias gender dan ketidakadilan yang menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan akan selalu menjadi persoalan, seperti timbulnya subordinasi, marjinalisasi, *stereotype* atau pelabelan, kekerasan, ataupun beban ganda yang biasanya menimpa kaum perempuan.

Selanjutnya, di dunia media bentuk pelabelan dan hubungan yang timpang antara laki dan perempuan sesungguhnya tidak terjadi secara kebetulan. Berbagai penelitian yang mengacu pada fenomena ini tidak hanya terjadi di dunia ketiga, di mana budaya patriarki masih cukup dominan, tetapi juga di negara-negara maju yang mana kesetaraan dan sensitivitas gender di area publik relatif lebih baik. Kajian-kajian tentang *gender perspectives* tetap saja menjadi topik yang selalu menarik untuk dikaji karena berbagai kejadian berulang yang menunjukkan ketimpangan ini tetap saja terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari dunia industri yang mana profit merupakan target utama dari sebuah proses produksi, keberadaan media yang bisa "menjual" dengan sendirinya juga merupakan strategi tersendiri bagi pekerja ataupun pemilik media. Sementara itu, isu perempuan dengan segala perspektifnya, mulai dari tubuh hingga aktivitas dan kiprahnya baik di area publik maupun domestik hingga saat ini masih merupakan objek yang selalu menarik bagi media. Maka tidaklah heran jika pandangan yang bias, tidak sensitif, dan bahkan melecehkan, dalam pemberitaan masih saja marak di ranah ini. Seperti yang diungkapkan oleh Edward S. Herman dan Noam

Chomsky dalam buku mereka *Manufacturing Consent*, bahwa korporasi media baik cetak maupun elektronik sesungguhnya merupakan entitas bisnis di mana keuntungan ataupun profit adalah yang utama. Dengan demikian, adanya isi pemberitaan yang distorsif, bias, propaganda sesungguhnya merupakan konsekuensi dari motif ataupun profit yang diinginkan (Herman and Chomsky, 1988:5)

Dalam konteks Indonesia misalnya, minimnya pemberitaan berperspektif gender telah mendorong organisasi media seperti Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) mengadakan berbagai kajian dan penelitian tentang penggambaran perempuan di surat kabar dan televisi di Indonesia. Bekerja sama dengan *Development and Peace (DnP)*, penelitian mengambil sampel media cetak seperti *Indo Pos*, *Kompas*, *Warta Kota*, *Republika*, *Suara Pembaruan*, *Koran Tempo*, dan *Media Indonesia*, periode Juli-Agustus 2010. Sedangkan, untuk televisi sampelnya adalah RCTI, SCTV, Metro TV, dan TVOne, periode Agustus-September 2010. (KOMPAS/08 Maret 2011)

Hasilnya adalah berita-berita yang bersifat diskriminatif dan tidak memihak pada kaum perempuan termasuk pelanggaran kode etik jurnalistik masih mendominasi. Misalnya, pada pemberitaan kekerasan dengan perempuan sebagai korban, perempuan korban kekerasan justru sering mengalami kekerasan ganda, karena ditampilkan dalam pemberitaan secara diskriminatif. Selain itu, peran domestik masih identik dengan perempuan, sementara berbagai pencapaian atau potensi perempuan dikesampingkan.

Dalam hal ini, menurut riset AJI, penggiat media masih belum memahami gender sehingga sudut pandang penulisan masih sangat terbatas. Hal ini bisa dilihat dari bahasa media yang cenderung mengeksploitasi seksual dan vulgar mengenai isu perempuan.

Selain itu, media massa memiliki peranan yang penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai tertentu, karena memiliki

beberapa fungsi seperti: sebagai alat untuk mengawasi lingkungan dan menghubungkan bagian-bagian dalam masyarakat; mengirimkan warisan sosial, dan memberikan hiburan (Sunarto, 2000:1). Fungsi-fungsi ini menjadi sangat esensial jika ada kepentingan pihak tertentu di dalamnya. Misalnya, adanya penggiringan opini publik, pengalihan isu, ataupun kamufase berita, sesungguhnya merupakan bentuk kepentingan dari pihak tertentu dengan menggunakan fungsi media sebagai wadah sosialisasinya. Fungsi sosialisasi ini merupakan fungsi yang strategis karena mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat termasuk kepentingan dan ideologi tertentu.

C. BAHASA MEDIA

Bahasa adalah medium yang menjadi perantara kita dalam memaknai sesuatu, memproduksi dan mengubah makna. Lewat bahasa (simbol-simbol dan tanda tertulis, lisan, atau gambar) seseorang kemudian dapat mengungkapkan pikiran, konsep, dan ide-ide tentang sesuatu baik. Makna sesuatu hal sangat tergantung dari cara kita "merekayasakannya".

Dengan meminjam Teori Representasi (*Theory of Representation*) Stuart Hall (1997), penggunaan bahasa (*language*) adalah untuk menyampaikan sesuatu yang berarti (*meaningful*) kepada orang lain. Representasi adalah bagian terpenting dari proses di mana arti (*meaning*) diproduksi dan dipertukarkan antara anggota kelompok dalam sebuah kebudayaan (*culture*). Representasi adalah mengartikan konsep (*concept*) yang ada di pikiran kita dengan menggunakan bahasa. Menurut Hall, ada dua proses representasi, pertama : representasi mental yaitu konsep tentang sesuatu yang ada di kepala kita masing-masing (peta konseptual). Representasi mental ini masih abstrak. Yang kedua adalah bahasa, yang berperan penting dalam proses konstruksi makna. Konsep abstrak tersebut harus diterjemahkan ke dalam "bahasa" yang lazim supaya kita dapat

menghubungkan konsep dan ide-ide kita tentang sesuatu, dengan tanda dan simbol-simbol tertentu. Representasi tidak hanya berarti “to present”, “to image”, atau “to depict”. “representasi” adalah sebuah cara di mana memaknai apa yang diberikan pada benda yang digambarkan, “so the representation is the way in which meaning is somehow given to the things which are depicted through the images or whatever it is, on screens or the words on a page which stand for what we’re talking about”. Dengan demikian, ketika suatu ide atau wacana diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau bahasa tertentu, sesungguhnya merupakan pencerminan dari konsepsi abstrak si penutur atas sesuatu hal

Selanjutnya, menurut Hall konsep representasi bisa berubah-ubah, selalu ada pemaknaan baru atas makna sebelumnya, karena makna sendiri tidak pernah tetap. Makna selalu berada dalam proses negosiasi dan disesuaikan dengan situasi baru. Makna selalu dikonstruksi, diproduksi lewat proses representasi (Hall, 1997:61-63).

Merujuk pada beberapa judul-judul berita tentang perempuan dan korupsi di atas, akan terbangun berbagai macam asumsi berdasarkan interpretasi dari pembaca ataupun *audience*. Setidaknya ada fakta ataupun konsep yang diperjelas di sini bahwa perempuan dan korupsi akhir-akhir ini menjadi persoalan yang cukup serius. Ketika perempuan sudah bergerak ke sektor publik ataupun politik, tidak akan sendirinya bisa menghentikan laju korupsi di negeri ini. Bahkan, mungkin muncul asumsi baru bahwa misalnya, keberadaan perempuan di sektor ini justru hanya akan menambah deretan panjang kasus korupsi yang ada, politik merupakan domain laki-laki, dan perempuan tidak akan mampu menduduki posisi ini, dan lain-lain.

Selain itu, jika mencermati berbagai pemberitaan seperti dalam kasus perempuan dan narkoba di area publik, dalam banyak hal, pemberitaan media sering keluar dari esensi kasus yang dihadapi. Objektifikasi perempuan utamanya *sexual appeal*

tetap menjadi pilihan yang menarik sehingga bukan tidak mungkin akan mengalihkan isu yang sesungguhnya terjadi.

Selanjutnya, mengacu pada kajian semiotika oleh Roland Barthes, sebagaimana dikutip oleh Budiman (1999 : 22) dalam sistem tanda yang dalam hal ini dipresentasikan dalam bentuk kata-kata, tercermin asumsi-asumsi dari suatu masyarakat dalam waktu tertentu. Memaknai (*to signify*) dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengomunikasikan (*to communicate*). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu dikomunikasikan, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda.

Salah satu wilayah penting yang dirambah Barthes dalam studinya tentang tanda adalah peran pembaca (*the reader*). Dalam uraian Barthes diterangkan bahwa tanda denotatif (*denotative sign*) terdiri atas penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*). Akan tetapi pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif. Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan tetapi juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. Dalam semiologi Barthes denotasi merupakan sistem sigfikasi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat kedua. Bagi Barthes, dalam pemaknaan suatu sistem tanda yang ada adalah konotasi, karena makna "harfiah" merupakan sesuatu yang bersifat alamiah, yang melekat pada tanda itu sendiri. Namun demikian, konotasi, walaupun merupakan sifat asli dari suatu tanda membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi (Budiman, 1999:25).

Ketika suatu berita dikomunikasikan dengan cara yang bias dan multi-interpretasi, seperti *headline news* yang kita uraikan di atas, maka kemudian akan timbul dan melekat ideologi tertentu yang dalam istilah Barthes disebut mitos. Mitos ini berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan

pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu.

Dalam kasus di atas, misalnya ketika berbagai pemberitaan diungkapkan dalam perspektif yang tidak berimbang maka mitos dan ideologi yang diinginkan pun akan semakin melekat di masyarakat ataupun pembaca. Misalnya akan terbangun ideologi patriarkhi yang dominan, ataupun asumsi-asumsi bahwa area publik dan politik bukanlah untuk perempuan, atau hal yang menarik dari perempuan hanya semata *sexual appeal*, dan-lain-lain.

Selain itu, *image* tentang perempuan dan korupsi tentunya merupakan sesuatu yang baru di negeri ini. Setelah selama ini banyak perempuan hanya bergelut di sektor domestik, dan akses untuk memasuki wilayah politik (praktis) kemudian terbuka lebar, setidaknya ada ketentuan kuota 30 % untuk legislatif, maka ketika beberapa figur wanita tersebut tersangkut korupsi, ada fenomena menarik yang dianggap pantas untuk diangkat di sini. Dengan judul dan analisa yang terkesan menggelitik dan berlebihan, akan tercipta proses pemaknaan baru bahwa ketika wanita kemudian diberi hak dan porsi yang sama dengan laki-laki khususnya di area publik, utamanya politik, kredibilitas mereka pun seakan tidak lebih baik atau bahkan lebih buruk.

Lebih lanjut, seperti yang dijelaskan Hall, teori representasi sendiri dibagi dalam tiga teori atau pendekatan yaitu (1) *reflective approach* yang menjelaskan bahwa bahasa berfungsi seperti cermin yang merefleksikan arti yang sebenarnya. Dengan pendekatan ini, makna dari suatu objek terletak pada objek, benda, atau ide itu sendiri, atau mimetic approach (2) *Intentional approach*, di mana bahasa digunakan untuk mengekspresikan arti personal dari seseorang penulis, pelukis, dll. Pendekatan ini memiliki kelemahan, karena menganggap bahasa sebagai permainan privat (*private games*) sementara di sisi lain menyebutkan bahwa esensi bahasa adalah

berkomunikasi didasarkan pada kode-kode yang telah menjadi konvensi di masyarakat bukan kode pribadi. (3) *Constructionist approach* yaitu pendekatan yang menggunakan sistem bahasa (*language*) atau sistem apapun untuk merepresentasikan konsep kita (*concept*). Pendekatan ini tidak berarti bahwa kita mengkonstruksi arti (*meaning*) dengan menggunakan sistem representasi (*concept dan signs*), namun lebih pada pendekatan yang bertujuan mengartikan suatu bahasa (*language*).

Dalam dunia pers, ketika pekerja media menuturkan suatu pesan atau kejadian kepada masyarakat, *reflective approach* ini merupakan salah satu rambu utama yang harus diperhatikan, dalam artian, apa yang dilaporkan adalah hal atau pun fakta yang sebenarnya, yang tidak boleh dilebihkan atau dikurangi. Inilah bentuk pertanggungjawaban moral dan profesi pers kepada masyarakat, bahwa pers harus menjunjung tinggi kebenaran, meski terkadang sangat sulit dan butuh perjuangan. Bentuk-bentuk berita reportase dalam dunia jurnalisme biasanya menggunakan pendekatan ini, karena yang diutamakan adalah pemaparan fakta kejadian yang sebenarnya untuk sampai pada khalayak ketika judul dan pemberitaan yang terkesan menyudutkan dan vulgar, ada kesan *intentional approach* yang tersendiri oleh pekerja ataupun redaksi media. Terkesan ada maksud tersembunyi yang ingin disampaikan oleh jurnalis dengan pernyataan-pernyataan yang bias dan bahkan multi interpretatif. Misalnya, dengan memberi judul "Tiga Diva Penghuni Rumah Tahanan KPK" ataupun, "KPK didatangi Wanita-wanita Seksi" ada kesan yang kuat bahwa kehadiran perempuan di wilayah politik yang kemudian berurusan dengan KPK hanya "merepotkan" negara dalam arti yang tidak substantif dan secara esensial sesungguhnya terkesan melecehkan keberadaan wanita itu sendiri. "Wanita-wanita seksi" atau "Tiga Diva" yang secara konotatif diartikan sebagai "objek penghibur" seakan memperkuat *stereotype* perempuan sebagai warga kelas dua. Dalam hal ini, peran jurnalis sangat besar dalam mengarahkan atau bahkan mempengaruhi opini publik. Terlebih

ketika pandangan ataupun perspektif mereka bersifat bias, maka diksi dan penekanan berita pun kadang bisa menyesatkan.

Selain itu, dalam pendekatan *contructionist*, interpretasi atas suatu ide, konsep ataupun tanda sesungguhnya terkait dengan sistem budaya tertentu yang bisa saja berbeda antar daerah satu dengan yang lain. Misalnya, interpretasi atas warna *traffic light*, merupakan bentuk konsensus masyarakat atas suatu tanda. Dalam hal ini kode, apapun bentuknya, memiliki implikasi yang luas dari pada makna yang dilekatkan pada suatu bahasa ataupun kata.

Dalam kasus di atas misalnya, "wanita-wanita seksi" dalam budaya timur, lebih dimaknai dalam konotasi negatif, karena lebih menonjolkan *sexual appeal* daripada kapasitas perempuan secara utuh. Sementara kasus-kasus itu sendiri sesungguhnya terkait dengan jabatan, atau kapasitas perempuan di ranah publik yang tidak berkaitan dengan penampilan mereka secara fisik. Ketika pers, menggunakan pendekatan ini dalam mengupas suatu berita, maka akan mudah tercipta *stereotype* atas perempuan yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga perempuan secara umum.

Stereotype adalah pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang salah. Terlepas dari benar tidaknya kasus-kasus yang membelit para wanita dalam kasus di atas, dengan pelabelan yang salah maka dengan sendirinya akan mengokohkan dan subordinasi perempuan di bawah laki-laki, yakni penilaian posisi atau peran perempuan dalam masyarakat yang dianggap lebih rendah dari posisi atau peran laki-laki.

Dalam banyak kasus, baik ekonomi maupun politik, kondisi ini tentu saja merugikan perempuan secara umum. Selain adanya objektivikasi atas perempuan, dalam kehidupan bernegara misalnya, dalam pendapatan per kapita negara, pekerjaan perempuan tidak dihitung atau bernilai rendah, begitu

juga dalam jumlah perempuan yang duduk sebagai pengambil kebijakan/keputusan dalam ruang publik ataupun pemerintahan.

Selain itu, gaya pengungkapan yang mengaitkan perempuan dengan korupsi seperti dalam "Perempuan-perempuan Koruptor" ataupun "Perempuan-perempuan di balik Skandal Korupsi" seperti judul di atas, sesungguhnya akan menguatkan asumsi bahwa dunia politik ataupun korupsi merupakan dunia laki-laki. Dan ketika perempuan kemudian terlibat di dalamnya, hal tersebut seakan menjadi suatu anomali. Meski dalam skala yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kasus korupsi laki-laki, model pemberitaan seperti ini tentu saja akan berakibat luas pada marginalisasi perempuan di ranah publik khususnya politik. Misalnya ada peminggiran peran ekonomi perempuan dengan asumsi bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan, serta peminggiran peran politik perempuan dengan asumsi bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, dan seterusnya. Secara umum tentu saja hal ini mengakibatkan proses pemiskinan terhadap peran kaum perempuan.

Lebih lanjut, secara universal, seperti yang diadopsi ke dalam UU Pokok Pers, pers memiliki lima fungsi utama. Pertama, fungsi informasi (*to inform*), yakni memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secepat-cepatnya. Kedua, fungsi edukasi (*to educate*), yakni apapun informasi yang disebarluaskan oleh pers hendaknya dalam rangka mendidik masyarakat. Ketiga, fungsi koreksi (*to influence*) atau juga sering disebut fungsi kontrol, yakni ikut mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, agar tetap berjalan pada rel (aturan main) yang benar. Keempat, fungsi rekreasi (*to entertain*), yakni pers juga harus bisa menjadi wahana hiburan yang sehat dan mencerahkan. Dan, kelima, fungsi mediasi (*to mediate*), yakni pers harus dapat menjadi mediator untuk menyampaikan kabar tentang berbagai peristiwa penting yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dengan kelima fungsi ini, diharapkan masyarakat yang mendapat informasi akan tercerahkan. Namun demikian,

ketika masyarakat mendapatkan informasi yang salah, bias, tendensius, ataupun memojokkan pihak- pihak tertentu, persoalan lain pun tentunya akan bermunculan.

Dalam hal fungsi edukasi misalnya, bahasa pers yang baik tentunya tidak memihak ataupun menghakimi dan bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat. Fakta yang disampaikan pun hendaknya tetap dalam koridor kepatutan dan kepantasan sebagai konsumsi publik. Sebab, dalam hal ini fungsi edukasi tidak saja harus tercermin pada materi isi berita, gambar, fiksi dan artikel-artikelnya, tetapi juga harus tampak pada bahasanya.

Namun demikian, ketika pers berhadapan dengan industri, yang mana untuk mendapatkan perhatian *audience* adalah target yang utama, berbagai macam cara pun akan dilakukan, seperti pelanggaran ketentuan kode etik jurnalisme, termasuk pemakaian bahasa yang kurang pantas.

Dalam analisa judul-judul pemberitaan media di atas misalnya, "KPK didatangi Wanita-wanita Seksi" yang diulas oleh Metro TV tgl 20 Februari 2012, beragam interpretasi kemudian dipahami berbeda oleh audien yang berasal dari berbagai latar belakang sosial. Misalnya, dikotomi wilayah antara perempuan dan laki-laki semakin diperjelas yaitu wilayah politik sesungguhnya merupakan wilayah laki-laki. Dan ketika para perempuan terlibat dalam dunia politis-kriminal, seakan menggambarkan sesuatu yang anomali. Wanita diidentikkan sebagai makhluk seksi yang hanya peduli dengan kecantikan, dan ketika mereka tersangkut dengan berbagai kasus korupsi, pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan dan gerakan kesetaraan gender pun semakin sumir. Konstruksi sosial bahwa *image* atau citra seorang perempuan itu berada di wilayah domestik, orang *rumahan* dan baik-baik. Namun demikian, ketika perempuan terkena masalah hukum ataupun melanggar norma yang ada, maka, cap atau stigma baru "bukan perempuan baik-baik" akan dengan mudah dilekatkan. *Headline* tentang

“perempuan-perempuan koruptor” di atas, pada dasarnya bentuk representasi dari stigma baru yang dilekatkan pada kaum perempuan

Selain itu, ketika pembaca dihadapkan pada suatu judul berita atau wacana tertentu, yang tercermin adalah pemadatan isi dan cerminan isi berita tersebut. Judul berperan penting untuk menggiring pembaca agar menelusuri isi berita. Judul tersebut ibarat etalase pada sebuah toko yang memberikan gambaran isi di dalamnya. Namun demikian, ketika sebuah judul terkesan provokatif dengan maksud agar menarik orang untuk membaca isinya, maka judul tersebut kadang tidak hanya kehilangan esensi dari berita yang disampaikan, tetapi juga tidak seluruhnya merepresentasikan berita yang disampaikan, atau bahkan menyesatkan.

D. KEPENTINGAN POLITIK DAN ALAT PROPAGANDA

Menurut Komaruddin (2009), dasar dari kehidupan sosial adalah ekonomi. Maka, pendekatan “ekonomi politik” merupakan cara pandang yang dapat membongkar dasar atas sesuatu masalah yang tampak pada permukaan. Begitu juga dengan permasalahan sensitivitas gender seperti diulas di atas. Berita yang tidak sensitif tentunya tidak terjadi secara kebetulan. Ada banyak kepentingan yang bermain di dalamnya, baik kepentingan ekonomi maupun politik, baik personal maupun komunal.

Menurut Vincent Mosco dalam bukunya *the Political Economy of Communication* (2009) penerapan pendekatan ekonomi politik memiliki tiga konsep awal, yaitu: komodifikasi, spesialisasi, dan strukturasi. Komodifikasi adalah upaya mengubah apapun menjadi komoditas atau barang dagangan sebagai alat mendapatkan keuntungan. Dalam media massa tiga hal yang saling terkait adalah: isi media, jumlah audiens dan iklan. Berita atau isi media adalah komoditas untuk menaikkan jumlah audiens atau oplah. Jumlah audiens atau oplah juga

merupakan komoditas yang dapat dijual pada pengiklan. Uang yang masuk merupakan profit dan dapat digunakan untuk ekspansi media. Ekspansi media menghasilkan kekuatan yang lebih besar lagi dalam mengendalikan masyarakat melalui sumber-sumber produksi media berupa teknologi. Selanjutnya, spasialisasi adalah cara-cara mengatasi hambatan jarak dan waktu dalam kehidupan sosial. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, jarak dan waktu bukan lagi hambatan dalam praktek ekonomi politik. Spasialisasi berhubungan dengan proses transformasi batasan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Dapat dikatakan juga bahwa spasialisasi merupakan proses perpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi dan besarnya badan usaha media. Akhirnya, komodifikasi dan spasialisasi dalam media massa menghasilkan strukturasi atau penyeragaman ideologi secara terstruktur. Media yang sama pemiliknya akan memiliki ideologi yang sama pula. Korporasi dan besarnya media akan menimbulkan penyeragaman isi berita yang mana penyeragaman ideologi tak akan bisa dihindari. Dengan kata lain, media dapat digunakan untuk menyampaikan ideologi pemiliknya.

Komodifikasi bahasa yang terkesan berlebihan atau bahkan provokatif yang ditulis atau diungkapkan oleh pekerja media, sesungguhnya lebih pada bagaimana menarik audien ataupun pembaca sebanyak-banyaknya untuk membeli ataupun mengikuti apa yang diberitakan. Pada media cetak misalnya, *headline* berperan penting untuk memancing keingintahuan orang untuk membaca atau membeli koran atau majalah yang ditawarkan. Begitu juga dengan televisi atau media elektronik lainnya, ada *spot* iklan dan *rating* yang harus diperjuangkan oleh pekerja media. Untuk itu, kemasan wacana dan model pemberitaan yang menggelitik dan menarik seakan sudah menjadi keharusan. Dengan demikian, pemeo bahwa *a bad news is a good news* seakan-akan telah menjadi patokan tersendiri bagi para pencari berita agar tidak kehilangan audien atau pembaca. Dalam rangka mempertahankan kepentingan pragmatis dan

bisnis inilah, terkadang para jurnalis ataupun awak media harus kehilangan “ideologi” dan daya kritisnya, melanggar sejumlah kode etik jurnalistik seperti bias gender, propaganda atau bahkan menyudutkan pihak-pihak tertentu.

Dalam banyak hal, model pemberitaan yang seperti ini tidak hanya merugikan korban dalam kasus yang diberitakan, tetapi tentu saja kaum perempuan secara umum. Ketika pers sendiri sudah bias dan memberi pemahaman yang keliru kepada masyarakat, maka bentuk kesetaraan yang menjadi dasar perjuangan hak-hak kaum perempuan pun akan sulit dicapai. Objektivikasi kaum perempuan akan terus terjadi dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Dalam ranah politik, misalnya, akan ada keraguan pihak-pihak tertentu akan kapasitas dan kemampuan perempuan selaku pemimpin.

Selain itu, menurut Ashadi Siregar (2000), dalam hal proses penyampaian fakta publik menjadi informasi media pers, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- a. Sejauh mana pelaku profesi media pers terjamin dalam menjalankan kewajibannya dalam mencari fakta-fakta bersifat publik yang dapat dijadikan informasi media pers.
- b. Sejauh mana person yang memiliki jabatan publik berkewajiban untuk memberikan fakta di bawah kewenangannya kepada pelaku profesi media massa untuk dijadikan informasi media pers.

Proses informasi media massa kepada masyarakat.

- a. Sejauh mana warga masyarakat terjamin haknya mendapat informasi publik bersifat obyektif yang tidak direkayasa oleh kepentingan kekuasaan (negara, modal atau kelompok masyarakat) dan pengelola media, melalui diversitas media dan kontinuitas media pers.

- b. Sejauh mana kekuasaan (negara, modal dan kelompok masyarakat) dan pengelola media massa berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik bersifat obyektif melalui diversitas media pers.

Proses menyatakan pendapat masyarakat.

- a. Sejauh mana warga masyarakat terjamin haknya untuk menyatakan pendapatnya, baik dalam bentuk informasi publik maupun estetis, melalui diversitas media pers.
- b. Sejauh mana pengelola media pers berkewajiban untuk menampung pendapat warga masyarakat.

Karena pers memiliki potensi yang besar untuk mempengaruhi opini publik, maka tanggung jawab pers untuk menyampaikan berita yang objektif, lugas, tidak memihak, tidak bias dan propaganda juga sudah menjadi keharusan. Karena seperti yang ditekankan oleh Ashadi Siregar, masalah mendasar kebebasan pers tidak hanya pada keberanian untuk mengolah kata sebagai konsumsi publik, namun kaidah informasi jurnalisme setidaknya perlu dilihat dari dua sisi, pertama informasi yang dicari dan disampaikan merupakan masalah publik, dan kedua, informasi memiliki signifikansi berkonteks pada kehidupan publik. Untuk itu perlu dibedakan sifat fakta yang dijadikan informasi, yaitu antara fakta privat dengan fakta publik. Adakalanya fakta privat seseorang dalam jabatan publik, memiliki signifikansi dalam kehidupan publik sehingga dapat menjadi informasi jurnalisme.

Untuk kasus-kasus media yang bias seperti di atas misalnya, harus ada alat kontrol seperti *media watch* sebagai upaya untuk menjaga kebebasan pers baik dari kepentingan kekuasaan maupun kepentingan pragmatis pers itu sendiri. Karena seperti yang diungkapkan oleh Ashadi Siregar, kedua hal itu merupakan "musuh" yang merusak kebebasan pers, sehingga media pers bukan lagi sebagai forum bebas bagi kebenaran, tetapi hanya menjadi alat untuk merekayasa masyarakat. Dengan kata lain,

lembaga *media watch* berpretensi untuk menilai sejauh mana institusi pers dapat berfungsi sebagai zona netral yang bersih dari kekuasaan eksternal maupun kepentingan internal dari pengelola atau pemilik perusahaan media.

E. PENUTUP

Bahasa media merupakan bentuk komunikasi jurnalisme untuk konsumsi publik. Sesuai dengan hakikat dan ketentuannya, bahasa media tidak hanya bersifat informatif, ataupun menghibur, tetapi juga harus mendidik dan memberikan pencerahan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendasari pentingnya semacam kode etik jurnalistik, sebagai pedoman dan alat kontrol bahasa maupun isi yang disampaikan.

Namun demikian, sebagaimana diungkapkan sebelumnya, media juga bagian dari dunia industri di mana berbagai kepentingan seperti *spot* iklan, pemilik modal ataupun kepentingan (kekuasaan) lain bermain di dalamnya. Para pekerja pers dituntut untuk bisa menarik perhatian khalayak semaksimal mungkin, meski terkadang harus melanggar aturan yang ada.

Selain itu, pada dasarnya tidak ada pers yang benar-benar netral, termasuk keberpihakan/ketidakterpihakan mereka pada masalah gender dan perempuan. Dan hal ini sesungguhnya tercermin dalam tulisan-tulisan ataupun wacana yang diungkapkan. Namun demikian, ketika seorang jurnalis sudah berkomitmen untuk terjun dalam dunia jurnalistik ini, keberpihakan mereka sesungguhnya adalah untuk khalayak. Dengan demikian, kontrol terhadap keberadaan pers ini sesungguhnya juga sangat esensial, agar ada tercipta dunia pers yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Babe, E, Robert. 2010. *Cultural Studies and Political Economy*. New York: Lexington Book.
- Burton, Greame. 1997. *More than Meets the Eye*. London: Arnold Headline.
- Fairelough, Norman. 1993. *Languge and Power*. London and New York: Longman.
- Fowler, Roger. 1991. *Language in the News*. New York: Routledge.
- Hall, Stuart. 1979. *Representation: Culture Representation and Signifying Practices*. London: Sage Publication Jewkes, Jvonne.
- Hall, Stuart (ed). *Culture, Media, language*. 1996. New York: Routledge.
- Hasan, Komaruddin. 2009. "Kapitalisme, Organisasi Media dan Jurnalis (Perspektif Ekonomi Politik Media)" dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dinamika*. Universitas Baturaja, Volume 2 No. 3, Juni.
- Kafiris, Krini. 2005. *The Gender and Media Handbook: Promoting Equality, Diversity and Empowerment*. Cyprus: Mediterranean Institute of Gender Studies.
- Mosco, Vincent. 2009. *The Political Economy of Communication*. London: Sage publication.